

LAPORAN PARTISIPASI POLITIK ANAK MUDA TERHADAP ISU LINGKUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH



© Yayasan Partisipasi Muda, 2021

Tim Penulis:

Belinda Sahadati Amri Arief C. Nugraha Mita Putri Novita Sari

Penanggung Jawab:

Neildeva Despendya

Desain Tampilan:

Ersa Mauliza

Terimakasih kepada:

Dr. Alfindra Primaldhi selaku konsultan dalam riset ini

Informasi Kontak:

admin@partisipasimuda.org

Sekilas Desain Cover:

Apapun pekerjaan kamu, kamu akan tetap terdampak dari masalah lingkungan yang ada di sekitar mu. Jadi mulai menyuarakannya ke pemerintah daerah ya!

KATA PENGANTAR

Sebagai organisasi non-profit yang memiliki misi untuk memberikan edukasi politik bagi anak muda (17-25 tahun), Yayasan Partisipasi Muda atau "Generasi Melek Politik" ingin membangun kesadaran kepada anak muda bahwa politik bisa mempengaruhi kualitas lingkungan hidup kita.

Apa hubungannya dengan politik? Karena **Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) bisa menentukan nasib lingkungan kita.** Kepala daerah sebagai aktor yang terpilih secara demokratis memiliki kuasa besar untuk membuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan dan juga lingkungan akan sangat bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah.

Hal ini membuat Generasi Melek Politik ingin memberikan kesadaran (awareness) kepada anak muda yang tinggal di daerah yang masih memiliki hutan yang luas seperti Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa bencana alam yang selama ini dialami seperti banjir dan longsor, disebabkan oleh peran pemimpin daerahnya juga, yang asal memberi izin. Keberlanjutan hutan tidak dipikirkan, sehingga keluarlah izin penggunaan lahan yang morat-marit.

Sebagai anak muda, kita harus memilih kepala daerah atau kepala negara yang "melek" terhadap perlindungan lahan hutan. Agar hutan tidak rusak oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lainnya.

Laporan survey ini dibuat untuk memetakan masalah-masalah lingkungan dari mata anak muda di 4 provinsi di Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Riau. Generasi Melek Politik ingin melihat sejauh mana anak muda di 4 provinsi "rawan" tersebut sadar akan permasalahan lingkungan di depannya, yang juga ternyata berkaitan dengan politik. Harapannya, pemetaaan masalah ini bisa digunakan untuk sesama komunitas, non-profit, lembaga riset, ataupun pemerintah, untuk menjadikan perlindungan hutan sebagai prioritas pembuatan kebijakan dan program kerja. Sehingga, siapapun yang ingin maju sebagai bupati ataupun gubernur kedepan, memprioritaskan perlindungan hutan dan

KATA PENGANTAR

tidak berani melakukan praktek korupsi izin lahan. Generasi Melek Politik ingin masalah ini diketahui sebanyak-banyaknya anak muda di Indonesia, sehingga kita bisa bergandengan tangan untuk memilih dan mengawasi kepala daerah yang sedang memimpin.

Kami sangat berterimakasih atas partisipasi komunitas dan non-profit organization di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berkontribusi di pembuatan laporan ini, yaitu: Sulawesi Tengah Bergerak, Konferensi Kepulauan Yesien, Walhi Sulawesi Tengah, Sikola Mombine, Seangel Indonesia, Jatam Sulawesi Tengah, Pepelingasih Sulawesi Tengah, Turun Tangan Palu, Komiu Sulawesi Tengah.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat untuk Indonesia kedepan, agar hutan kita lebih terjaga dan kepala daerah kita lebih "melek" lingkungan.

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN PARTISIPASI MUDA

NEILDEVA DESPENDYA

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	3
	Daftar Isi	5
	Daftar Tabel dan Diagram	6
	Ringkasan Eksekutif	8
01	PENDAHULUAN	9
	Latar Belakang	10
	Metodologi Penelitian	11
02	PEMBAHASAN	14
	Permasalahan Lingkungan Di Provinsi Sulawesi Tengah	15
	Peran Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Lingkungan Di Provinsi Sulawesi Tengah	21
	Peran dan Partisipasi Anak Muda dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah	23
03	PENUTUP	30
	Kesimpulan	31
	Saran	31
	Daftar Pustaka	32

DAFTAR TABEL

DAN DIAGRAM

Tabel	Tabel 1.	Persebaran Demografi Responden	12
Diagram	Diagram 1.1	Tingkat Persepsi Anak Muda Terhadap Pentingnya Isu Lingkungan di Sulawesi Tengah	17
	Diagram 1.2	 A. Pengetahuan Anak Muda terhadap Masalah Lingkungan B. Minat terhadap Isu Lingkungan Anak Muda yang Tidak Mengetahui Masalah Lingkungan 	18 18
	Diagram 1.3	Tingkat persepsi anak muda terhadap dampak masalah lingkungan di Sulawesi Tengah	20
	Diagram 2.1	Tingkat Persepsi Anak Muda terhadap Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan di Sulawesi Tengah	22
	Diagram 2.2	Tingkat persepsi anak muda terhadap keberhasilan kebijakan lingkungan di Sulawesi Tengah	22
	Diagram 3.1	Tingkat Pengeluaran Aspirasi/ Pendapat Anak Muda terhadap Isu Lingkungan di Sulawesi Tengah	23
	Diagram 3.2	Tingkat Partisipasi Anak Muda dalam Kegiatan Organisasi Lingkungan di Sulawesi Tengah	25
	Diagram 3.3	Tingkat Ketertarikan Anak Muda untuk Mengeluarkan Aspirasi/ Pendapat terkait Isu Lingkungan Di Sulawesi Tengah	27

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Diagram	Diagram 3.4	Tingkat Pelibatan Anak Muda Terhadap Pembuatan Kebijakan Lingkungan di Sulawesi Tengah	28
	Diagram 3.5	Tingkat harapan anak muda terhadap Pilkada 2020 di isu lingkungan	29
Grafik	Grafik 1.1	Masalah Lingkungan yang diketahui oleh Anak Muda Sulawesi Tengah	19
	Grafik 1.2	Penyebab Masalah Lingkungan menurut Anak Muda Sulawesi Tengah	19
	Grafik 1.3	Dampak Kerusakan Lingkungan Terhadap Anak Muda di Provinsi Sulawesi Tengah	20
	Grafik 3.1	Media yang digunakan anak muda untuk mengeluarkan aspirasi/ pendapat tentang isu lingkungan di sulawesi tengah	24

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami banyak permasalahan lingkungan. Mulai dari deforestasi, pencemaran air dan tanah, sampai dengan masalah sampah. Dampak dari permasalahan lingkungan pun dialami masyarakat oleh disana. Salah satunya bencana banjir yang banyak masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah alami, merupakan yang dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat over eksploitasi sumber daya alam di provinsi tersebut.

Dengan melihat besarnya dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, tidak mengherankan jika dari 643 responden muda, terdapat 90% mengetahui terkait isu lingkungan di daerah mereka. Yang mana, 84% responden anak muda menganggap bahwa isu lingkungan sangat penting. Namun demikian, tercatat bahwa 38% responden anak muda menganggap pemerintah dalam upava menyelesaikan masalah lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah terbilang cukup buruk. Hal ini diimbangi dengan persepsi anak muda Provinsi Sulawesi Tengah yang 39% menganggap bahwa kebijakan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah tidak terlalu baik.

Aspirasi maupun pendapat anak muda di isu lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, namun demikian tidak semua responden anak muda sudah menyuarakan aspirasi mereka. Walaupun rasio responden anak muda yang pernah menyuarakan dan belum pernah menyuarakan masih terhitung seimbang (50%). Responden yang pernah menyuarakan aspirasinya, paling banyak menggunakan facebook sebagai media yang mereka gunakan (46%). Bagirespondenyang tidak pernah menyuarakan aspirasi mereka, terdapat kemungkinan bahwa mereka akan melakukan hal tersebut kedepannya dikarenakan 90% responden muda yang belum pernah tertarik untuk menggunakan suara mereka.

Walaupun peran anak muda terbilang masih kurang dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah (30%), sebanyak 82% responden anak muda tetap optimis bahwa dengan Pemilihan Kepala Daerah 2020, anak muda dapat menyampaikan aspirasi/ pendapatnya terhadap isu lingkungan.

LATAR BELAKANG

Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Sektor sumber daya alam yang menjadi keunggulan Sulawesi Tengah merupakan sektor perkebunan, perikanan dan juga pertambangan. Selain itu, sektor kehutanan di Sulawesi Tengah juga merupakan sektor sumber daya alam yang menjadi penopang perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian, eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di wilayah tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu masalah lingkungan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah deforestasi. Dengan luas wilayah kurang lebih 6,2 juta hektar, sebagian wilayah Sulawesi Tengah merupakan hutan, yaitu seluas 4 juta hektar. Namun demikian pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah masih belum berjalan secara maksimal, melihat deforestasi yang terjadi di provinsi tersebut dari tahun 2011 sampai dengan 2019 mencapai luasan 722. 624.05 hektar.¹ Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia, kegiatan ekstraksi kayu dari pengusahaan kayu dan ilegal menjadi faktor dominan yang mengakibatkan deforestasi. Namun, beberapa waktu kebelakang, perkebunan monokultur mendominasi kehilangan hutan di Indonesia. Bahkan, beberapa waktu kedepan diprediksi bahwa infrastruktur dapat menjadi pemicu utama terjadinya deforestasi khususnya di wilayah timur Indonesia. Deforestasi di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri terjadi akibat alih guna hutan yang digunakan untuk industri ekstraktif (seperti pertambangan) dan monokultur (seperti sawit).²

Tidak hanya deforestasi, Sulawesi Tengah mempunyai masalah lingkungan lainnya, seperti sampah, pencemaran air dan tanah, serta masalah lainnya yang perlu diselesaikan. Melihat hal tersebut, dibutuhkan peran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang ada disana. Namun demikian, pada praktiknya untuk menyelesaikan masalah lingkungan, diperlukan peran dari banyak pihak. Baik itu peran pemerintah, korporasi maupun masyarakat sipil. Mengingat, masalah lingkungan merupakan masalah multidimensi yang berdampak pada semua lapis masyarakat. Tidak terkecuali juga dengan anak muda. Sangat penting bagi para pembuat kebijakan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melibatkan anak muda dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang ada di daerah tersebut. Dengan total sekitar 996 ribu anak muda (2015), dapat dilihat bahwa anak muda mempunyai peran yang besar dalam kehidupan bermasyarakat di Sulawesi Tengah, termasuk juga untuk menjaga lingkungan.³

¹ https://komiu.id/deforestasi-pulau-sulawesi-mencapai-2-juta-hektar-dari-tahun-2001-s-d-2019/, diakses 30 Januari 2021. 2 Lembar Fakta "Angka Deforestasi Sebagai Alarm Memburuknya Hutan Indonesia", Forest Watch Indonesia, 2019 3 BPS, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015.



Dari penjelasan diatas, Yayasan Partisipasi Muda ingin melihat bagaimana peran anak muda dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Hal tersebut yang akan menjadi fokus Yayasan Partisipasi Muda dalam penyusunan laporan yang berjudul "Pemetaan Masalah Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah." Di laporan ini, Yayasan Partisipasi Muda akan menyorot masalah lingkungan yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah dan kebijakan yang pemerintah daerah buat untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada. Tentu saja, Generasi Melek Politik akan melihat keterlibatan anak muda dalam pembuatan kebijakan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan riset di 4 daerah. Harapan Yayasan Partisipasi Muda, laporan ini dapat membuka mata pembuat kebijakan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melibatkan anak muda dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Laporan ini dibuat dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam proses pengumpulan data, Yayasan Partisipasi Muda tidak hanya melakukan desk research namun juga focus group discussion dan juga wawancara terhadap para stakeholder di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kemudian data tersebut kami analisis untuk kemudian kami sandingkan bersama dengan kebijakan lingkungan yang sudah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah buat dalam rangka menyelesaikan masalah lingkungan yang terdapat di wilayah tersebut.

TABEL 1. PERSEBARAN DEMOGRAFI RESPONDEN

Jenis Kelamin	Komposisi
Perempuan	50%
Laki-Laki	50%

Umur	Komposisi
17-20	40,5%
21-25	42%
26-30	16,4%
>30	0,8%

Latar Belakang Pendidikan	Komposisi
S2	1,4%
SI	37,9%
SMA	60,3%
SD	0,3%

Bidang Pekerjaan	Komposisi
ASN (PNS, BUMN, BUMD, dll)	2%
Pegawai	2%
Pengajar (Dosen/Guru)	2%
Ibu Rumah Tangga	4%
Wiraswasta	7%
Freelancer	9%
Pekerja Swasta	12%
Mahasiswa/Pelajar	62%

TABEL 1. PERSEBARAN DEMOGRAFI RESPONDEN

Metode kuantitatif juga digunakan di survey ini dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling4 (tidak acak), dengan menyasar responden umur 17-38 tahun dengan jumlah responden yang mengisi survei adalah 714 responden. Sebanyak 71 responden tidak sesuai dengan target kami, sehingga data responden yang bisa diolah sebanyak 643 orang, dari total

⁴ Teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu

responden, 643 diantaranya adalah 322 perempuan, 321 laki-laki. Responden yang kami sasar merupakan anak muda yang memiliki akses pada internet dan aktif sebagai pengguna media sosial.

Survei ini bertujuan menilai pengetahuan serta kepedulian kaum millenial di Provinsi Sulawesi Tengah terhadap isu lingkungan dan tingkat partisipasi politik mereka. Jenis pertanyaan terbagi dalam: pilihan ganda (close-ended), isian singkat (short and open-ended), dan pertanyaan berskala. Survey ini bersifat non-representative yang berarti tidak mencerminkan pandangan seluruh anak muda yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, penggunaan kata anak muda yang terdapat dalam laporan ini merujuk pada anak muda di Sulawesi Tengah yang menjadi responden survei.

Focus group discussion dan survey tersebut kami lakukan untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana pengetahuan serta kepedulian kaum millenial di Provinsi Sulawesi Tengah terhadap isu lingkungan?" dan "Bagaimana tingkat partisipasi politik mereka dalam isu lingkungan?"

1. PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yayasan Partisipasi Muda menemukan bahwa masalah lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan masalah yang kompleks, melihat fakta bahwa masalah yang terjadi di provinsi tersebut tidak terbatas pada satu isu saja. Namun yang pasti, provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang rawan terkena bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah gempa bumi. Sering terjadinya bencana tersebut karena posisi geografis Sulawesi Tengah yang berada di antara 4 zona sesar yaitu Sesar Saddang, Sesar Gorontalo, Sesar Matano, dan Sesar Palu-Koro. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setidaknya telah terjadi sepuluh kali gempa di provinsi ini, yakni pada 1927, 1930, 1938, 1994, 1996 (terjadi dua kali), 1998, 2005, 2008, dan 2012.Gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tengah terjadi terakhir pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 28 September. Gempa tersebut terjadi Pukul 18.02 WITA dengan kekuatan sebesar 7,4 magnitudo dan mengenai Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar.⁶

Sulawesi Tengah juga merupakan provinsi yang sering mengalami bencana banjir. Di bulan Juli 2020 saja, dalam satu pekan terdapat 5 kabupaten yang terkena banjir, yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Parigi Moutong. Namun demikian, berbeda dengan gempa bumi yang terjadi sebagai dampak atas letak geografi, bencana banjir terjadi daerah tersebut karena kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang marak terjadi dan mengakibatkan deforestasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Jika melihat data Yayasan Kompas Peduli Hutan (Komiu), tercatat dari tahun 2011 sampai dengan 2019, deforestasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 722.624.05 hektar. Hal tersebut menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang memiliki deforestasi terbesar di Pulau Sulawesi, disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai luasan deforestasi 333.364.55 hektar.8 Kabupaten yang memiliki luasan deforestasi terbesar pertama adalah Kabupaten

Banggai (76,5 ribu hektar), yang kedua adalah Kabupaten Tojo Unauna (66,7 ribu hektar), kemudian disusul oleh Kabupaten Buol (45,6 ribu hektar), Kabupaten Banggai Kepulauan (44,2 ribu hektar) dan Kabupaten Morowali (42,8 ribu hektar).

⁵ https://tirto.id/sesar-palu-koro-sering-bikin-gempa-tapi-minim-data-c3AP, diakses 30 Januari 2021.

⁶ Kajian Gempa Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Pusat Studi Gempa Nasional, November 2018.

 $^{7\} https://www.antaranews.com/berita/1606778/dalam-sepekan-5-kabupaten-di-sulteng-dilanda-banjir, diakses 30\ Januari 2021.$

⁸ https://komiu.id/deforestasi-pulau-sulawesi-mencapai-2-juta-hektar-dari-tahun-2001-s-d-2019/, diakses 30 Januari 2021

 $^{9\} https://komiu.id/5-kabupaten-dengan-deforestasi-terbesar-di-sulawesi-tengah/,\ diakses\ 30\ Januari\ 2021.$

Sehingga dapat dikatakan bahwa deforestasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah telah masif terjadi, ditambah dengan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa deforestasi yang terjadi di Wilayah Sulawesi Tengah akan semakin bertambah. Terutama mengingat usaha-usaha berbasis lahan yang menyebabkan konversi hutan, seperti usaha perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan merupakan kegiatan usaha yang banyak dilakukan di Sulawesi Tengah. Sekarang ini saja tercatat bahwa terdapat 38 izin tambang di Kabupaten Morowali Utara yang kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya menjadi perhatian. Ditambah juga dengan aktivitas perambahan ilegal yang timbul karena didanai oleh pembeli kayu ilegal. Kurangnya kebijakan perlindungan hutan lindung serta hutan konservasi di Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan mudahnya penggunaan hutan untuk kegiatan usaha eksploitasi.¹⁰

Tidak hanya banjir, eksploitasi sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tengah juga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan turunnya kualitas hidup masyarakat. Salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Sulawesi Tengah adalah pencemaran limbah tailing yang diakibatkan oleh pertambangan nikel di Kabupaten Morowali. Catatan Walhi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa praktik pembuangan limbah tailing yang dilakukan di wilayah laut rentan menyebabkan banyak desa dan kawasan konservasi terdampak dari pencemaran itu. Selanjutnya, akan juga berdampak pada kegiatan masyarakat yang bergantung secara ekonomi dari sumber daya kelautan di wilayah tersebut, misal para nelayan.

Selain pencemaran lingkungan, persoalan sampah menjadi perhatian komunitas anak muda di Sulawesi Tengah. Dari diskusi yang diadakan oleh Yayasan Partisipasi Muda bersama organisasi lingkungan dan komunitas anak muda di provinsi tersebut, disebutkan bahwa sampah merupakan masalah yang dialami oleh masyarakat baik itu di daerah rural maupun daerah perkotaan. Seangel Palu menyatakan bahwa masalah sampah di pesisir Palu sudah sangat parah. Berdasarkan uji sampling sampah di wilayah tersebut, dalam jarak 2 meter dari pesisir saja dengan mudah ditemukan kandungan mencapai 168 Mg Mikroplastik.

Hal ini bisa berdampak serius pada kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir Palu. Untuk mengatasi persoalan sampah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah. Dalam pergub tersebut, dinyatakan bahwa Sulawesi Tengah menargetkan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga hingga 75% dari seluruh total sampah pada tahun 2020. Tentu saja untuk mencapai target dimaksud memerlukan penguatan dalam pengelolaan sampah di Provinsi Sulawesi Tengah. Sarana dan prasarana pengolahan sampah yang belum merata antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya menjadi salah

satu penyebab masalah sampah yang terjadi Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Buol misalnya. Di kabupaten ini, sampah yang telah dikumpulkan dari warga hanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berupa jurang. Metode sanitary landfill belum diterapkan di semua daerah, sehingga hanya Kota Palu yang menerapkannya. Dengan sanitary landfill, sampah dibuang dan dipadatkan dan kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tidak.menimbulkan bau busuk, kemudian mencegah berkembangnya bibit penyakit. Tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, sampah yang diperlakukan tanpa sanitary landfill, seperti di TPA Kabupaten Buol, menyebabkan gangguan bagi masyarakat seperti bau yang tidak sedap.

Seberapa Penting Isu Lingkungan Bagi Anda? (N=643)

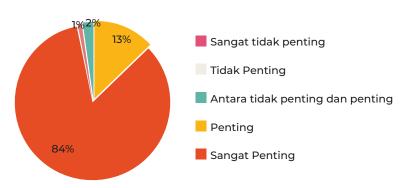


DIAGRAM 1.1: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERHADAP PENTINGNYA ISU LINGKUNGAN DI SULAWESI TENGAH

anda?(N=643)

A. Apakah anda mengetahui tentang B. Jika tidak tahu tentang masalah masalah lingkungan yang terjadi di daerah lingkungan yang terjadi di daerah anda, apakah anda tertarik untuk mengikuti isuisu lingkungan? (N=64)

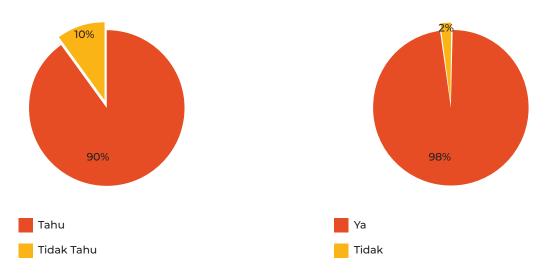
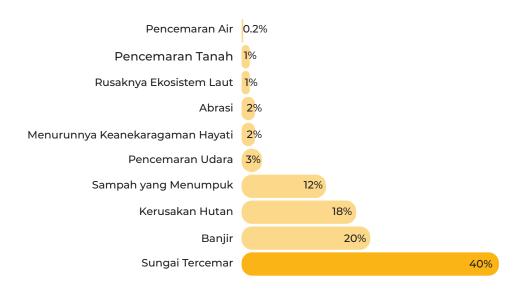


DIAGRAM 1.2: A. PENGETAHUAN ANAK MUDA TERHADAP MASALAH LINGKUNGAN. B. MINAT TERHADAP ISU LINGKUNGAN ANAK MUDA YANG TIDAK MENGETAHUI MASALAH LINGKUNGAN

Setelah melihat penjelasan tersebut, tidak heran jika permasalahan lingkungan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah disadari juga oleh para anak muda yang menjadi responden. Sekitar 90% responden mengetahui tentang masalah lingkungan yang ada pada sekitarnya, hanya 64 orang dari keseluruhan responden yang menyatakan tidak tahu, mereka yang tidak tahu pun sebenarnya memiliki minat dalam mengetahui mengenai isu lingkungan. (Diagram 1.2.). Yang mana, sebanyak 84% responden anak muda berpendapat bahwa isu lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi mereka dan hanya 3% yang menyatakan bahwa merasa isu tersebut bukan merupakan hal yang penting (Diagram 1.1.).

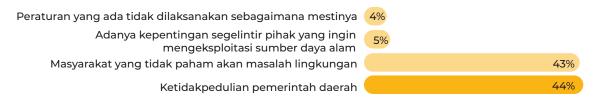
Temuan menarik kami adalah terdapat perbedaan signifikan tentang seberapa pentingnya isu lingkungan pada pendidikan tinggi (SI keatas) dibandingkan dengan pendidikan SD-SMA, hal ini terlihat dari analisa kami bahwa mean dari pendidikan SD-SMA sebesar 4,751, dibandingkan dengan pendidikan tinggi sebesar 4,850. Dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan tinggi lebih merasa isu lingkungan adalah hal yang penting.

Masalah lingkungan yang terjadi di daerah anda (Mengetahui, N = 579)



GRAFIK 1.1: MASALAH LINGKUNGAN YANG DIKETAHUI OLEH ANAK MUDA SULAWESI TENGAH

Menurut anda apa penyebab utama masalah lingkungan yang terjadi di daerah anda?



GRAFIK 1.2: PENYEBAB MASALAH LINGKUNGAN MENURUT ANAK MUDA SULAWESI TENGAH

Lebih lanjut, hasil survey juga menyatakan bahwa sungai tercemar (40%) sebagai masalah lingkungan yang paling banyak diketahui oleh para responden. Setelah itu, disusul oleh banjir (20%) dan kerusakan hutan (18%). Responden anak muda di Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa penyebab dari masalah lingkungan didominasi oleh dua hal, diantaranya adalah ketidakpedulian pemerintah daerah (44%) dan masyarakat yang tidak paham akan masalah lingkungan (43%).

Apakah anda juga terdampak dari masalah lingkungan yang terjadi di daerah anda? (N=643)

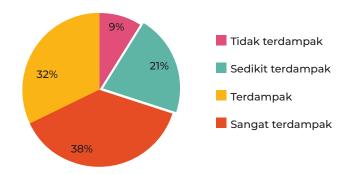


DIAGRAM 1.3: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERHADAP DAMPAK MASALAH LINGKUNGAN DI SULAWESI TENGAH

Apabila terdampak, apa saja dampaknya (Responden yang terkena dampak, responden kurang n)



GRAFIK 1.3: DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP ANAK MUDA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Persoalan lingkungan menjadi perhatian komunitas muda karena sebagian besar khawatir dengan dampak yang mungkin mengancam mereka baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dari diagram 1.3, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden anak muda sudah merasakan dampak (70%) dari masalah lingkungan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan yang sedikit terdampak sebesar 21% dan yang tidak terdampak hanya 9%. Dari total 587 responden yang menjawab terdampak, ternyata kesehatan merupakan dampak yang paling banyak dirasakan akibat dari kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut (71%).

2. PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebenarnya sudah memberikan prioritas terhadap pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Hal tersebut tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD) 2016-2021 yang menyatakan bahwa Sulawesi Tengah ingin mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia. Target dan sasaran dari upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tersebut, termasuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup dan mengoptimalisasi tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung. Bahkan, dalam RPJMD tersebut juga memasukan unsur penguatan penegakan hukum di isu sumber daya alam dan lingkungan yaitu dengan cara Meningkatnya kemampuan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta penanggulangan bencana.

Tentu saja tantangannya ada pada pelaksanaan dan dokumen perencanaannya. Dalam periode 2016 – 2020, tidak banyak kebijakan lingkungan yang diterbitkan untuk melaksanakan rencana pembangunan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam periode tersebut adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah. Alih-alih, berbagai peraturan daerah justru diterbitkan untuk mengatur eksploitasi sumber daya alam, seperti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Termasuk juga rencana peraturan mengenai tata ruang, baik itu wilayah provinsi maupun pesisir dan pulau kecil, yang dikritik oleh organisasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut anda, bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan di daerah anda? (N=643)

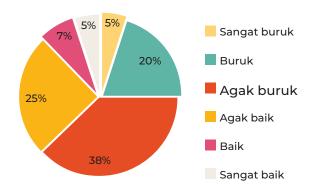


DIAGRAM 2.1: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LINGKUNGAN DI SULAWESI TENGAH

Menurut anda, bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah anda? (N=643)

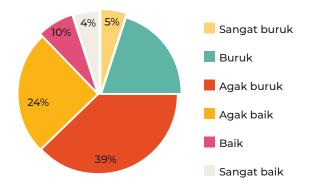


DIAGRAM 2.2: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERHADAP KEBERHASILAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI SULAWESI TENGAH

Hal tersebut juga tercermin pada hasil survey dimana anak muda di Sulawesi Tengah yang berpendapat bahwa upaya pemerintah tidak maksimal dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Terbukti bahwa terdapat 63% responden anak muda di Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa upaya pemerintah daerah terbilang buruk dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Yang mana kemudian, hasil survey tadi berhubungan dengan kebijakan pemerintah daerah yang dianggap oleh responden anak muda tidak dapat menyelesaikan persoalan lingkungan yang ada.

3. PERAN DAN PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Perumusan kebijakan publik memiliki empat tahapan, tahap pertama adalah perumusan masalah, kedua adalah setting agenda kebijakan, ketiga adalah pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, tahapan keempat adalah penetapan kebijakan. Tahapan-tahapan ini memiliki aktor-aktor dalam merumuskan kebijakan, yaitu Lembaga eksekutif, Lembaga legislatif, Lembaga yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan dan warga individu.

Warga individu seringkali tidak mendapat porsi yang besar dalam tahapan perumusan kebijakan. Penyaluran aspirasi dari masyarakat secara individu seringkali tidak memiliki ruang dalam tahapan perumusan kebijakan. Dalam konsepsi ini, ruang publik tidak diartikan secara fisik tetapi merupakan ruang sosial yang dihasilkan oleh tindakan komunikatif. Ruang publik menjadi tempat bagi terbentuknya opini publik yang merefleksikan isu-isu yang berkembang di masyarakat.

BAB 2 PEMBAHASAN

Apakah anda pernah menyampaikan aspirasi atau pendapat tentang persoalan lingkungan di daerah anda kepada pemerintah? (N=643)

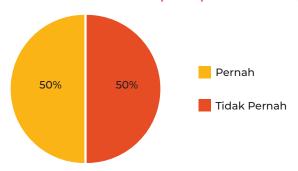
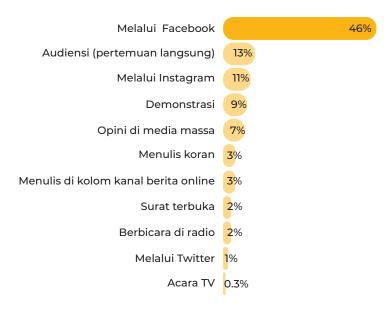


DIAGRAM 3.1: TINGKAT PENGELUARAN ASPIRASI/PENDAPAT ANAK MUDA TERHADAP ISU LINGKUNGAN DI SULAWESI TENGAH

Menurut anda apa penyebab utama masalah lingkungan yang terjadi di daerah anda?



GRAFIK 3.1: MEDIA YANG DIGUNAKAN ANAK MUDA UNTUK MENGELUARKAN ASPIRASI/PENDAPAT TENTANG ISU LINGKUNGAN DI SULAWESI TENGAH

Diagram 3.1 menjelaskan bahwa sebagian responden pernah menyampaikan pendapat aspirasi tentang masalah lingkungan terhadap pemerintah. Bentukbentuk ruang publik untuk menyampaikan aspirasi sendiri dalam pembuatan kebijakan sangat beragam. Ia dapat berupa pemberitaan di media massa; diskusi di kalangan kelompok-kelompok masyarakat; audiensi dengan lembaga legislatif atau lembaga lain yang berwenang dalam pengambilan keputusan; bahkan jajak pendapat. Dari total 319 responden anak muda yang pernah menyuarakan pendapat dan aspirasi lingkungan di isu lingkungan, facebook merupakan kanal yang paling banyak mereka gunakan (46%). Diikuti oleh audiensi/pertemuan langsung, dan juga Instagram dengan masing-masing 13% dan 11% (Diagram

3.2). Dengan demikian, sesungguhnya terdapat peluang yang besar untuk memperluas ruang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan melalui sosial media ataupun mengadakan ruang-ruang diskusi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Tidak hanya itu, terlibat dalam kegiatan organisasi lingkungan juga menjadi salah satu alternatif bagi komunitas muda untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya terkait persoalan lingkungan. Tercatat lebih dari 62% pernah terlibat dalam berbagai bentuk yang sifatnya kegiatan langsung seperti menjadi relawan penanganan bencana, terlibat dalam melakukan pemulihan lingkungan, mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan penguatan sanitasi publik, maupun diskusi dan advokasi yang dilakukan bersama organisasi tersebut.



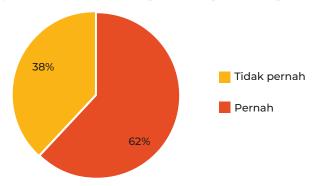


DIAGRAM 3.2: TINGKAT PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM KEGIATAN ORGANISASI LINGKUNGAN DI SULAWESI **TENGAH**

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh komunitas muda bersama dengan organisasi lingkungan di daerah Sulawesi Tengah adalah advokasi terkait RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Bencana gempa bumi dan likuifaksi di Sulawesi Tengah yang terjadi pada tanggal 29 September 2019 mendesak pemerintah daerah untuk memperbaiki RTRW provinsi maupun RTRW kota/ kabupaten yang sudah mereka miliki. Di Kota Palu misalnya, pesisir kota tersebut ditetapkan sebagai zona perdagangan dan jasa. Padahal, kawasan pesisir Kota Palu merupakan kawasan yang rawan akan bencana alam, seperti tsunami atau longsor. Sehingga, apabila terjadi bencana alam maka dampak yang timbul akan lebih besar. Oleh karena itu, Sulteng Bergerak bersama dengan Walhi Sulawesi Tengah dan organisasi lingkungan lainnya mendorong agar resiko mitigasi bencana menjadi dasar dalam pembentukan RTRW Sulawesi Tengah. Terdapat dua cara yang mereka lakukan untuk mendorong isu tersebut, yang pertama dengan melakukan rapat dengan pendapat kepada pihak legislatif (DPRD Provinsi Sulawesi Tengah) maupun eksekutif (Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah). Cara yang kedua, adalah dengan aksi demonstrasi, yang dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat luas terkait pentingnya tata

ruang daerah dalam pelaksanaan mitigasi bencana, sehingga tekanan yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Sulawesi Tengah menjadi lebih besar.

Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat juga merupakan cara yang banyak digunakan oleh komunitas muda di Provinsi Sulawesi Tengah. Contohnya, dalam permasalahan sampah. Di Kota Palu, bak sampah yang ada tidak cukup untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Palu juga belum berjalan secara efisien. Walaupun komunitas anak muda sudah meminta kepada Pemerintah Kota Palu untuk menambah bak sampah dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah, permohonan tersebut tidak kunjung direalisasikan. Pepelingasih, sebagai perkumpulan anak muda yang peduli dengan lingkungan, akhirnya memilih menggunakan metode edukasi dan sosialisasi kepada warga Kota Palu. Dikarenakan advokasi kebijakan dirasa gagal, pendekatan ke masyarakat menjadi cara lain bagi perkumpulan tersebut untuk menyelesaikan masalah sampah di Kota Palu. Dengan harapan, ketika masyarakat sadar dan teredukasi dengan masalah sampah, maka keinginan untuk menjaga lingkungan akan timbul dan tekanan masyarakat kepada pemerintah daerah akan menjadi lebih besar.

Terlepas dari ruang gerak yang tersedia tersebut, partisipasi anak muda dalam politik lingkungan di Sulawesi Tengah sendiri mengalami banyak hambatan. Melihat dari hasil FGD kami, tanggapan responden muda cukup beragam, salah satunya menyoroti persoalan di anak muda sendiri yang tidak memiliki kesadaran terkait dengan lingkungan, cuek, pesimis, maupun merasa tidak memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk menyuarakan persoalan lingkungan atau dilibatkan.

Sementara itu, lainnya juga menyebutkan minimnya pelibatan dari pemerintah terhadap akses bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasinya. Pemerintah dalam halini dipandang cenderung memandang sebelah mata, tidak mendukung, dan tidak menyediakan informasi yang memadai untuk memungkinkan anak muda tersebut terlibat (24%). Sebagai tambahan menurut komunitas muda di Sulawesi Tengah tersebut wadah dan ruang kesempatan untuk menyampaikan aspirasi itu sendiri terbatas (27%). Sehingga kegiatan-kegiatan seperti yang diselenggarakan oleh Yayasan Partisipasi Muda merupakan salah satu terobosan yang bisa meningkatkan ruang aspiratif tersebut. Terlebih lagi, dari 83 responden anak muda yang pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah, 50% menyatakan bahwa aspirasi dan pendapat mereka sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan lingkungan di daerah mereka.

Jika tidak pernah, apakah anda tertarik untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat anda terkait persoalan lingkungan daerah anda kepada pemerintah?

(Responden yang tidak pernah, N = 324)

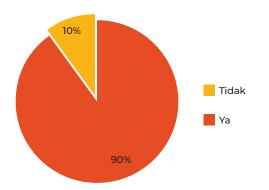


DIAGRAM 3.3: TINGKAT KETERTARIKAN ANAK MUDA UNTUK MENGELUARKAN ASPIRASI/PENDAPAT TERKAIT ISU LINGKUNGAN DI SULAWESI TENGAH

Meskipun kelompok muda yang tidak pernah menyampaikan aspirasi ini berimbang, dari Diagram 3.3 terlihat sebagian besar komunitas muda tertarik untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah (90%). Peluang ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat sumber daya dan juga masukan terhadap pemerintah daerah. Diagram 3.4 menjelaskan tentang opini anak muda dalam survei kami terhadap pelibatan anak muda untuk mengatasi masalah lingkungan, mereka menjawab sangat tidak dilibatkan, tidak dilibatkan, kurang dilibatkan dengan total sebanyak 50%, sementara itu yang menjawab agak dilibatkan, dilibatkan, dan sangat dilibatkan sebesar 50%. Dapat kita simpulkan bahwa anak muda sebagian merasa kurang dilibatkan. Pemerintah Daerah dapat memberikan ruang publik untuk terjadinya pelibatan, pemberi masukan, dan juga pertukaran argumentasi karena hal tersebut menjadi esensi penting untuk meningkatkan kadar partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Pelibatan partisipasi anak muda tentu saja tidak hanya dari sisi kuantitatif (hanya dihitung dari jumlah partisipan atau jumlah organisasi masyarakat yang dilibatkan), tapi juga dari sisi, tetapi juga secara kualitas pelibatan partisipasi tersebut. Proses kebijakan akan jauh lebih bermakna sebagai proses demokrasi manakala partisipasi diperluas maknanya sebagai kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara argumentatif.

BAB 2 PEMBAHASAN

Menurut anda, apakah anak muda cukup dilibatkan dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah anda? (N=643)

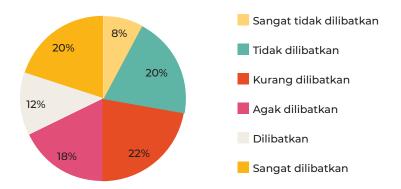


DIAGRAM 3.4: TINGKAT PELIBATAN ANAK MUDA TERHADAP PEMBUATAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI SULAWESI **TENGAH**

Tingginya harapan dan ekspektasi itu, juga bersamaan dengan optimisnya kelompok muda untuk memperkuat ruang gerak politiknya. Anak muda dalam survey ini sebesar 82% merasa Pilkada memiliki harapan besar kepada pemilihan kepala daerah 2020 untuk dapat memberikan mereka peluang dalam memberikan mereka ruang untuk dapat menyuarakan aspirasi mereka terkait lingkungan. Anak muda memiliki harapan yang besar terhadap kepala daerah terpilih nantinya untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Termasuk dengan menawarkan dan memberikan pendapat tentang bagaimana sebaiknya kebijakan perlindungan lingkungan dapat dilakukan. Diantaranya dengan menyatakan agar kepala daerah terpilih nantinya lebih responsif terhadap persoalan lingkungan dan menerima aspirasi masyarakat yang luas terkait dengan kebijakan yang berdampak pada lingkungan hidup.

Menurut anda, apakah pemilihan kepala daerah 2020 dapat menjadi peluang bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya terkait isu lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah? (N=643)

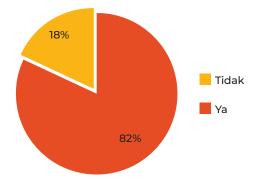


DIAGRAM 3.5: TINGKAT HARAPAN ANAK MUDA TERHADAP PILKADA 2020 DI ISU LINGKUNGAN

BAB 03 PENUTUP

BAB 3
PENUTUP

KESIMPULAN

Terlihat dari berbagai bentuk partisipasi di Sulawesi Tengah terkait masalah lingkungan, beberapa dapat dilihat bahwa responden anak muda sudah bergerak untuk mengatasi masalah-masalah tersebut melalui sosialisasi dan edukasi pada tingkat masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan dipandang sebagai isu penting bagi para responden anak muda. Pengetahuan responden pada isu-isu lingkungan di sekitarnya pun mulai tergali, terutama karena dampak persoalan lingkungan pun dialami oleh mereka. Responden anak muda di Sulawesi Tengah menyadari bahwa kebijakan pemerintah selama ini masih tidak memadai untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun tingkat partisipasi pada ranah kebijakan saat ini masih terbatas untuk menyampaikan persoalan lingkungan. Dihadapkan pada terbatasnya informasi dan tidak tersedianya ruang untuk menyampaikan aspirasi, menjadi tantangan bagi komunitas muda.

Hal ini tidak menyurutkan sebagian anak muda di Sulawesi Tengah yang mengupayakan penyampaian perhatian mereka perihal persoalan lingkungan melalui keterlibatannya dalam organisasi lingkungan, sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pertemuan dengan pemerintah seperti audiensi dan rapat dengar pendapat, maupun demonstrasi. Selain itu, komunitas muda memandang optimis bahwa pemilihan kepala daerah dapat menjadi peluang untuk membuka ruang politik anak muda. Catatan mengenai pendapat anak muda di Sulawesi Tengah ini memberikan gambaran pentingnya kegiatan yang dapat membangun jembatan antara komunitas muda dengan pemerintah atau calon kepala daerah untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

SARAN

- 1. Membuat wadah resmi dalam rangka mengumpulkan aspirasi dan pendapat anak muda, terutama di isu lingkungan, untuk kemudian dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan daerah.
- 2. Melibatkan anak muda secara aktif dalam pembuatan kebijakan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah, bisa dimulai dengan mengundang komunitas muda yang fokus di isu lingkungan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka.
- 3. Mensosialisasikan informasi terkait pembuatan kebijakan lingkungan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada anak muda.

DAFTAR

PUSTAKA

BERITA ONLINE

Antara. Dalam sepekan, 5 kabupaten di Sulteng dilanda banjir. Diakses 30 Januari 2021. https://www.antaranews.com/berita/1606778/dalam-sepekan-5-kabupaten-di-sulteng-dilanda-banjir

Firdausi, Fadrik Aziz. Sesar Palu-Koro: Sering Bikin Gempa, tapi Minim Data. diakses 30 Januari 2021. https://tirto.id/sesar-palu-koro-sering-bikin-gempa-tapi-minim-data-c3AP

Younastya, Andhika. 5 Kabupaten Dengan Deforestasi Terbesar Di Sulawesi Tengah. diakses 30 Januari 2021. https://komiu.id/5-kabupaten-dengan-deforestasi-terbesar-di-sulawesi-tengah

Younastya, Andhika. Deforestasi Pulau Sulawesi Mencapai 2 Juta Hektar Dari Tahun 2001 Sd 2019. diakses 30 Januari 2021. https://komiu.id/deforestasi-pulau-sulawesi-mencapai-2-juta-hektar-dari-tahun-2001-s-d-2019

FOCUS GRUP DISCUSSION

Focus Group Discussion Bersama dengan 10 NGO Lingkungan dan Komunitas Anak Muda di Provinsi Sulawesi Tengah

PUBLIKASI

BPS. 2015. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah.

Forest Watch Indonesia. 2019. Lembar Fakta "Angka Deforestasi Sebagai Alarm Memburuknya Hutan Indonesia".

Pusat Studi Gempa Nasional. Kajian Gempa Palu Provinsi Sulawesi Tengah. 2018. Mariana, Dede. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 216-229.

SURVEI

Generasi Melek Politik. 2020. Survey Partisipasi Politik Lingkungan Bagi Anak Muda di Provinsi Sulawesi Tengah.

